



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI BAGUS AROSYID**
2. Jabatan : **DIREKTUR PENGAWASAN KEPATUHAN PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAIN DAN PROFESI**
3. NHK : **521927**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.388.037.600**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 73 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 295.700.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/60 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 288.000.000
3. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 27.700.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/74 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 123.938.000
5. Tanah Seluas 221 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 49.699.600
6. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/50 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 39.500.000
7. Tanah Seluas 502 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 134.500.000
8. Tanah Seluas 379 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 429.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **196.600.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000
2. MOBIL, CHEVROLET CHAPTIVA Tahun 2014, HASIL SENDIRI



Rp. 110.000.000

3. MOBIL, NISSAN ELGRAND Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.

85.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 43.350.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 53.394.561

F. HARTA LAINNYA

Rp. 27.000.000

Sub Total

Rp. 1.708.382.161

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.708.382.161

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.